

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan penduduk di setiap wilayah dari waktu ke waktu sulit terkendali, terutama pertumbuhan penduduk di kota-kota besar. Sulitnya mencari pekerjaan di desa dan rendahnya tingkat pendapatan serta tingginya kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik menjadi beberapa alasan mengapa masyarakat melakukan urbanisasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat berimplikasi pada meningkatnya permintaan akan ruang untuk perumahan dan fasilitas lainnya. Pertambahan penduduk yang relatif cepat tersebut di satu sisi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan di sisi lain penurunan angka kematian yang lebih cepat. Selain daripada itu, struktur umur penduduk yang tidak berimbang, karena mayoritas penduduk berusia muda. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia pun dikatakan banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Munculnya efek negatif tersebut antara lain berdampak pada lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan krisis energi pada pangan akibat keterbatasan sumber daya yang merupakan hasil dari degradasi lingkungan dan mempengaruhi kesehatan lingkungan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Selain pengaruh lingkungan, ketersediaan lapangan dan tenaga kerja yang tidak mencukupi setelah pertumbuhan penduduk, dapat menyebabkan pengangguran, sejahatan dan kerusakan moral masyarakat karena mengacu pada tingginya beban negara untuk memungkinkan setiap warga negara hidup dengan layak.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, terutama melalui sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB). Program tersebut merupakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program KB ini telah dilaksanakan melalui berbagai upaya sejak awal, antara lain; kontrasepsi, pubertas, perkawinan dan upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program keluarga berencana (KB) di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1957, namun masih menjadi masalah Kesehatan dan belum menjadi masalah kependudukan. Tetapi karena jumlah penduduk Indonesia yang kian bertambah dan tingginya angka kematian ibu serta kebutuhan kesehatan reproduksi, maka program KB yang digunakan sebagai sarana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan Kesehatan ibu dan anak.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah kota Bandung. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai sub dari sistem Pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Program Keluarga Berencana yang dirancang oleh pemerintah ini merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan negara Indonesia. Pembangunan tersebut merupakan suatu interdependensi dalam rangka pengarah dan pengendalian serta membawa segala bentuk perubahan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat. Dalam pengertian terbatas ini, tidak semua perubahan yang terjadi dapat disebut perkembangan, karena perkembangan belum tentu menghasilkan perubahan yang sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya, perubahan yang direncanakan secara sistematis adalah kegiatan pembangunan. KB bertujuan mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan memajukan, melindungi dan mendukung terwujudnya hak reproduksi, serta memberikan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membangun keluarga. Mengatur kehamilan, meningkatkan ketahanan dan kebahagiaan keluarga.

Kondisi populasi penduduk yang terus meningkat itu tergambar dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).

**Table 1.1**  
**Jumlah Penduduk di Kota Bandung Tahun 2001-2021**

| Tahun | Jumlah Penduduk |
|-------|-----------------|
| 2001  | 2,146,360       |
| 2011  | 2,424,957       |
| 2020  | 2,444,160       |
| 2021  | 2,452,900       |

*Sumber : Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Selama 20 tahun terakhir, tepatnya dari tahun 2001-2021, populasi warga di Kota Bandung sudah bertambah hingga 306.540 jiwa. Data BPS menyebutkan, pada 2001, jumlah penduduk di Kota Bandung mencapai 2.146.360 jiwa. Selama 10 tahun setelahnya, tepatnya pada 2011, populasi itu naik 278.597 jiwa sehingga jumlah penduduk Kota Bandung pada saat itu mencapai 2.424.957 jiwa. Dengan kepadatan penduduk mencapai 14.494 jiwa per kilometer persegi. Kemudian 10 tahun setelahnya, tepatnya pada 2021, populasi warga di Kota Bandung kembali mengalami kenaikan. Penduduk Kota Bandung pada tahun 2020 ialah sebanyak 2.444.160 jiwa (BPS Kota Bandung). Dengan jumlah jiwa penduduk laki-laki sebanyak 1.231.116 dan jumlah jiwa penduduk perempuan sebanyak 1.213.044. dari tahun 2010-2020 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 0.21%. Jika dihitung dari tahun 2001 hingga 2021, total kenaikan populasi penduduk di Kota Bandung mencapai 306.540 jiwa, sehingga pada tahun tersebut jumlah warga di Kota Bandung tercatat mencapai 2.452.900 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 14.388 jiwa per kilometer persegi.

Setelah melakukan peninjauan dan fenomena empiric sebelumnya, ditemukan ada permasalahan pada efektivitas program yang dilakukan oleh DPPKB sebagai berikut:

1. Sistem *Boundary*

Mengacu pada observasi yang dilakukan oleh peneliti aparatur sipil negara cenderung melakukan pelanggaran kepada penduduk, pelanggaran yang ditemukan dengan tidak memberikan edukasi yang memberikan solusi khususnya kepada pasangan yang masih muda dengan memberikan

kebebasan pada saat berhubungan badan dan tidak diingatkan untuk menggunakan pengaman sehingga laju peningkatan penduduk di Kota Bandung semakin meluas.

## 2. Sistem Diagnostik

Aparatur sipil negara cenderung kurang paham terkait hal apa saja dan batasan apa saja untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait program keluarga berencana yang optimal, ketanggapan aparatur sipil negara selama berkomunikasi dengan masyarakat tidak diberikan pelayanan dengan maksimal sehingga setiap masyarakat yang melakukan konsultasi secara tidak langsung mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan keluarga berencana yang tepat.

Setelah menemukan permasalahan dan kondisi yang sedang terjadi belakangan ini, peneliti menemukan adanya sebab yang diduga oleh pengendalian management yang kurang terstruktur, sebagai berikut:

### 1. Sosialisasi Program

Program yang disosialisasikan kepada masyarakat terkait keluarga berencana sejauh ini tidak terealisasikan dengan maksimal, hal tersebut karena kurangnya informatif dari DPPKB dalam memberikan pengarahan dan edukasi khususnya kepada pasangan muda yang sudah menikah tidak secara baik, minimnya informatif tersebut berdampak negatif pada pertumbuhan penduduk serta mempengaruhi ketidaksiapan kedua orang tua dalam menghadapi situasi yang terjadi.

## 2. Keberhasilan Tugas

Mengacu pada pertumbuhan yang semakin meningkat, hasil dari pengendalian internal kurang optimal karena melalui temuan data yang ditemukan menunjukkan angka yang cukup signifikan terkait peningkatan pertumbuhan penduduk, hal tersebut diduga karena pengelolaan dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tidak memberikan dampak positif karena rasa kurang tanggapnya aparatur sipil negara terkait pemahaman dalam menjelaskan program keluarga berencana yang ditetapkan.

Masalah angka penduduk yang kian mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti yang terjadi di Kota Bandung sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELURAGA BERENCANA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pernyataan yang tertulis pada latar belakang, maka dapat diperoleh masalah yang akan di bahas pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh pengendalian pertumbuhan penduduk terhadap efektivitas program Keluarga Berencana di Kota Bandung?
2. Bagaimana faktor penghambat dari efektivitas program Keluarga Berencana di Kota Bandung?”

3. Bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengatasi faktor penghambat dari efektivitas Keluarga Berencana di Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang muncul dari latar belakang, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menerapkan pengaruh pengendalian pertumbuhan penduduk terhadap efektivitas program keluarga berencana di Kota Bandung.
2. Untuk menerapkan apa faktor penghambat dari efektivitas program Keluarga Berencana di Kota Bandung.
3. Untuk menerapkan usaha yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengatasi faktor penghambat dari efektivitas Keluarga Berencana di Kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan melalui Program Keluarga Berencana yang tidak hanya untuk pasangan suami istri saja namun juga bagi masyarakat luas yang akan. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain.
- 2) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literasi dan bahan evaluasi bagi Lembaga dan juga pengelola program. Juga penelitian ini dapat menjadi pengalaman bagi penulis serta menambah wawasan dan informasi mengenai Program Keluarga Berencana.